

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan, sebagaimana realita pada umumnya, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Hal ini tercermin dalam upaya perbaikan di berbagai sektor. Bagi kabupaten Manggarai Barat yang masih mengalami sisa dampak krisis pembangunan, kebutuhan program pembangunan masih sangat perlu diperhatikan terutama oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan memiliki responsivitas yang lebih tinggi dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di wilayahnya. Harapannya adalah agar program-program pembangunan dapat menjadi lebih efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terdapat di wilayah tersebut. Pembenahan dan pembangunan infrastruktur adalah tujuan utama yang mesti diperhatikan oleh pemerintah kabupaten Manggarai Barat saat ini. Mulai dari pembangunan jalan raya, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, jembatan, Air dan gedung-gedung sekolah.

Ironinya, pemenuhan kesejahteraan sosial melalui pembangunan terutama infrastruktur, pada dasarnya belum mencapai kesempurnaan dalam pelaksanaannya. Dalam kenyataan(pembangunan) infrastruktur di Manggarai Barat saat ini yang menjadi perhatian dari pemerintah masih sampai pada perkembangan di beberapa tempat. Sementara kalau melihat situasi pada umumnya, berbicara mengenai pembangunan infrastruktur dalam konteks Kabupaten Manggarai Barat justru sungguh memprihatinkan dan kerap kali menuai ambiguitas. Pembangunan selalu menunjukkan dualitas yang kontroversial dalam penampilannya.<sup>1</sup>

Hal ini tampak dalam kenyataan di mana renggangnya pembangunan dalam daerah yang hanya fokus di beberapa tempat seperti di ibu kota kabupaten dan beberapa

---

<sup>1</sup>Rio Nanto, *Politik Era Milenial Butir-butir Esai Politik Populer* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2020), hlm.73.

kecamatan dan desa daripada di tempat-tempat lain dalam daerah.<sup>2</sup> Di sini Penyelenggaraan desentralisasi kekuasaan adalah salah satu pengaruh yang menciptakan tatanan pemerintahan lokal menjadi kurang baik karena pemerintah masih dijelajahi oleh politik kepentingan.<sup>3</sup> Pemerintah yang lebih melayani aneka kepentingan para elit politik menciptakan ironi di tingkat lokal. Pembangunan berjalan tanpa visi yang jelas.

Banyak selentingan beredar bahwa “di wilayah Labuan Bajo pembangunan infrastruktur jauh lebih maju ketimbang di wilayah Mabar bagian Lembor (selatan) dan Kuwus dan Macang pacar (Utara)”. Pada tanggal 28 April 2022, Didimus Janu, seorang warga Golowelu di Kecamatan Kuwus, mengungkapkan bahwa jalan kabupaten di Kecamatan Kuwus hampir tidak mendapat perhatian yang cukup dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini tercermin dari jumlah proyek peningkatan jalan yang sangat minim dan sumber pendanaannya berasal dari APBD II. Sementara itu, masyarakat di belasan desa di Kecamatan Kuwus sangat membutuhkan infrastruktur jalan yang baik dan berkualitas. Didimus Janu menjelaskan bahwa Kecamatan Kuwus adalah daerah yang menghasilkan komoditas pertanian yang cukup tinggi setiap tahun. Namun, petani kesulitan dalam mengakses pasar dan menjual hasil pertaniannya karena kondisi jalan yang buruk.<sup>4</sup> Jalan yang sering terlupakan juga terjadi di Kecamatan Mbeliling, Manggarai Barat, adalah jalur penghubung antara Desa Golo Tantong dan Wae Jare, yang menghubungkan Kampung Kaca dan Rempong. Jalur ini merupakan rute utama bagi penduduk kedua desa tersebut yang ingin pergi ke Wae Jare atau sebaliknya. Namun, sayangnya, kondisi jalan ini sangat memprihatinkan. Jalan tersebut masih terbuat dari batu dan menjadi sangat licin saat musim hujan. Kondisi jalan yang rusak mencakup sekitar 5 kilometer, yang melintasi dua sungai yang sulit dilewati. Beruntungnya,

---

<sup>2</sup>Tampaknya pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Manggarai Barat saat ini masih terfokus pada ibu kota Labuan Bajo. Kebijakan semacam ini mungkin berpotensi mengabaikan kepentingan umum masyarakat dan lebih memprioritaskan kemajuan perkembangan ibu kota kabupaten. Dalam beberapa kasus, penekanan pada perkembangan kota utama atau pusat ekonomi dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan manfaat pembangunan. Memang pembangunan dan kemajuan ibu kota bisa membawa manfaat seperti peningkatan ekonomi dan peluang pekerjaan, seperti peningkatan menuju wisata premium. Tetapi, sebetulnya penting juga untuk memperhatikan kebutuhan dan perkembangan wilayah-wilayah di luar ibu kota. Hal ini dapat mencakup infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, serta upaya pengembangan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Pemerintah perlu mengambil pendekatan yang seimbang dalam pembangunan, memastikan bahwa kepentingan umum masyarakat di seluruh kabupaten, termasuk daerah-daerah pedesaan atau terpencil, tetap menjadi prioritas. Ini dapat membantu mengurangi ketidakadilan dan memastikan bahwa manfaat pembangunan tersebar merata di seluruh wilayah.

<sup>3</sup>Silvianus M. Mongko, *Demokrasi Minus Diskursus* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2016), hlm. 140.

<sup>4</sup>Gerasimos Satria, “Pembangunan Manggarai Barat Diminta Perhatikan Jalan Rusak”, dalam *VictoryNews*, <https://mabar.victorynews.id/manggarai-barat/pr-3393318960/pembangunan-manggarai-barat-diminta-perhatikan-jalan-rusak>, diakses pada 28 April 2023

salah satu sungai tersebut masih bisa dilintasi oleh kendaraan roda dua melalui jembatan gantung. Situasi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah atau pihak terkait untuk memperbaiki infrastruktur jalan ini agar masyarakat dapat mengakses dengan lebih mudah dan aman, terutama saat cuaca buruk.<sup>5</sup>

Kemudian, mengenai jaringan telekomunikasi seperti di kecamatan Lembor Selatan terdapat beberapa tempat belum bisa mengakses internet. Lalu, sejumlah gedung Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Manggarai Barat sangat juga memprihatinkan, antara lain: (1) Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nanga Nae di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo. (2) SDN Peri di Desa Daleng, Kecamatan Lembor. (3) SDN Wae Mege di Desa Watu Tiri, Kecamatan Lemnor Selatan. Kondisi gedung-gedung SD tersebut memerlukan perhatian serius untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur pendidikan demi memberikan lingkungan yang lebih baik bagi siswa dan tenaga pendidik.<sup>6</sup> Keadaan ini mengubah pembangunan yang dari awalnya merupakan sebuah kepentingan umum masyarakat kini menjadi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Konsekuensi-nya adalah kondisi kehidupan kemasyarakatan Manggarai Barat dalam kaitannya dengan pembangunan merasa tidak adil. Kehadiran pemerintah dalam situasi semacam ini tentu dipertanyakan dan dapat menjadi akar dari ketidakadilan di daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Dalam konteks ketidakadilan pembangunan di Manggarai Barat, penulis menggunakan kacamata John Rawls dalam konsepnya tentang keadilan. Ia berusaha untuk menganalisis struktur sosial masyarakat sebagai landasan bagi teori keadilannya. Dalam upayanya, ia mencoba menghidupkan kembali tradisi kontrak sosial untuk menguraikan dan mempertahankan visi liberalisme egaliter yang terperinci.<sup>7</sup> Pokok pembahasan dalam teori Rawls adalah praktik dan institusi dalam masyarakat. Rawls mengamati bahwa ada beberapa institusi sosial yang dapat menghasilkan perasaan iri dan kebencian.<sup>8</sup> Di sisi lain, institusi tersebut juga dapat mendorong keterasingan dan eksploitasi. Oleh karena itu, John Rawls menganggap bahwa kesetaraan atau

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>Gerasimos Satria, "Kondisi SDN Wae Mege Memprihatinkan", dalam *VictoryNews*, <https://mabar.victorynews.id/humaniora/pr-3394287727/gedung-sekolah-dasar-memprihatinkan>, di akses pada 24 Agustus 2022.

<sup>7</sup>Otto Gusti Madung, *Filsafat Politik: Negara dalam Bentangan Diskursus Filosofis* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2013), hlm. 162.

<sup>8</sup>John Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, penerj. Uzair Fauzan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 5.

distribusi yang adil dari manfaat harus menjadi dasar ketentuan konstitusi dan hukum yang membentuk institusi sosial.<sup>9</sup>

Rawls sangat menekankan pentingnya lembaga-lembaga ini dalam menentukan tingkat kebebasan dasar dan keadilan yang dialami oleh masyarakat dalam seluruh wilayah, daerah atau negara. Beberapa poin penting yang dapat diperhatikan. *Pertama*, struktur dasar masyarakat. Rawls mengacu pada struktur dasar masyarakat sebagai landasan konsep keadilan. Struktur dasar mencakup institusi-institusi sosial utama yang membentuk kerangka kerja bagi kehidupan sosial dan ekonomi. *Kedua*, pengaturan hak dan kewajiban mendasar. Lembaga-lembaga dalam struktur dasar bertanggung jawab untuk mengatur hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban yang mendasar. Ini mencakup hak-hak individu seperti kebebasan berbicara, hak atas pendidikan, dan lain sebagainya.<sup>10</sup> *Ketiga*, pembagian keuntungan sosial. Lembaga-lembaga ini juga berperan dalam pembagian keuntungan sosial yang muncul melalui kerja sama sosial. Ini berarti bahwa distribusi kekayaan dan manfaat dalam masyarakat harus diatur dengan cara yang adil sehingga semua anggota masyarakat dapat berbagi dalam keuntungan tersebut.<sup>11</sup> *Keempat*, keadilan dan kebebasan. Rawls mengemukakan bahwa lembaga-lembaga yang adil memungkinkan individu untuk menggunakan kebebasan dasar mereka sesuai dengan aturan yang adil tersebut. Ini menggambarkan hubungan antara keadilan dan kebebasan, di mana kebebasan individu terbatas oleh aturan yang adil yang diterapkan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. *Kelima*, kewajiban menjaga aturan yang adil. Rawls menyarankan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga agar aturan dalam struktur dasar tersebut berjalan dengan baik dan adil. Ini menunjukkan pentingnya partisipasi aktif dalam mendukung sistem keadilan.<sup>12</sup> Dalam konteks pemikiran Rawls, masyarakat yang terorganisir dengan aturan yang adil dapat memberikan kebebasan dan keadilan kepada individu-individu tanpa campur tangan yang tidak adil. Ini adalah visi ideal tentang bagaimana masyarakat harus diorganisir untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua anggotanya.<sup>13</sup>

Selain itu, penekanan pada dua prinsip penting dalam konsep keadilan John Rawls juga relevan dalam konteks ini. Prinsip *pertama*, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Otto Gusti Madung, *Jürgen Habermas & John Rawls* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2018), hlm. 32.

<sup>11</sup>John Rawls, *op. cit.*, hlm. 6.

<sup>12</sup>N. Daniels, *Membaca Rawls: Studi Kritis tentang Teori Keadilan Rawls* (New York: Buku Dasar, 1975), hlm. 25.

<sup>13</sup>*Ibid.*

yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, adalah dasar penting untuk memastikan bahwa hak-hak dasar individu dihormati dan dilindungi dalam proses pembangunan. Prinsip ini juga mengingatkan pentingnya memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Prinsip *kedua*, yang menyoroti perlunya mengatur ketimpangan sosial dan ekonomi sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan bagi yang minimal beruntung dan membuka peluang bagi semua individu, juga sangat relevan.<sup>14</sup> Ini mengisyaratkan bahwa pembangunan harus memberikan manfaat yang merata kepada seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di luar kota kabupaten. Sistem demokrasi yang memperhatikan martabat rakyat dapat menjadi alat yang efektif untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan ini dalam konteks pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan pembangunan infrastruktur dapat memastikan bahwa kepentingan semua pihak diwakili dan dipertimbangkan. Dengan menggabungkan konsep keadilan John Rawls dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks pembangunan di Manggarai Barat, kita dapat berharap untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan yang mendukung kesejahteraan semua warga daerah tersebut.

Dalam konteks Manggarai Barat, penerapan teori keadilan Rawls ini dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan dan ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini melibatkan pertimbangan tentang bagaimana sumber daya dan manfaat infrastruktur harus didistribusikan secara adil di antara berbagai tempat dalam seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat, terutama wilayah yang mungkin berada dalam posisi ekonomi atau sosial yang lebih lemah. Pembangunan infrastruktur yang memperhatikan prinsip-prinsip keadilan Rawls juga dapat membantu mengatasi masalah aksesibilitas, pengangguran, dan kesenjangan sosial di Manggarai Barat. Ini melibatkan pemikiran cermat tentang cara memprioritaskan proyek-proyek infrastruktur, alokasi sumber daya yang tepat, dan bagaimana melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan terkait infrastruktur.

Dengan menggunakan teori keadilan John Rawls sebagai landasan, pemerintah dan pemangku kepentingan di Manggarai Barat dapat bekerja sama untuk merancang dan melaksanakan kebijakan dan proyek-proyek infrastruktur yang mendorong pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adil bagi seluruh masyarakat. Dan untuk mencapai hal ini salah satu

---

<sup>14</sup>John Rawls, *op. cit.*, hlm. 72.

yang menjadi perhatian Pemerintah daerah seharusnya meminimalkan kepentingan kapitalisme dan mementingkan kepentingan masyarakat umum.<sup>15</sup>

Demikian setelah mengamati realitas masalah ketidakadilan dalam pembangunan infrastruktur di Manggarai Barat seperti yang telah diuraikan di atas, penulis akan membangun sebuah argumen untuk mengatasi persoalan ketidakadilan tersebut dengan menggunakan pandangan teori keadilan yang diajukan oleh John Rawls. Dasar yang akan dijadikan landasan dalam tulisan ini akan dirumuskan dalam judul skripsi sebagai berikut: "**Membaca Pembangunan Infrastruktur di Manggarai Barat dalam Terang Teori Keadilan John Rawls.**"

Dalam skripsi ini, penulis berusaha untuk menghubungkan realitas ketidakadilan dalam pembangunan infrastruktur dengan konsep keadilan yang diusulkan oleh John Rawls. Melalui analisis ini, penulis akan mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam teori Rawls dapat digunakan sebagai panduan untuk mengatasi ketidakadilan dalam pembangunan infrastruktur di Manggarai Barat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kesejahteraan sosial dalam kemasyarakatan hanya bisa terjamin apabila prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat efektif dalam menjalankannya. Karena itu penulis tertarik untuk mendalami dan menggali lebih mendalam tentang konsep keadilan John Rawls dan hubungannya terhadap pembangunan infrastruktur di Manggarai Barat yang kurang memadai sebagai upaya menjaga keutuhan kehidupan kemasyarakatan Manggarai Barat. Ada pun dasar yang hendak dibangun dalam tulisan ini dirumuskan dalam pertanyaan "Bagaimana pembangunan infrastruktur di Manggarai Barat dibaca dalam terang teori keadilan John Rawls?"

---

<sup>15</sup>Dalam konteks Kabupaten Manggarai Barat, langkah yang diambil pemerintah saat ini, yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur wisata premium, dapat dianggap sebagai cara untuk memberikan ruang kepada kapitalisme. Kapitalisme hadir dan berkolaborasi dengan pemerintah dengan tujuan mengambil manfaat dari potensi wisata premium untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, terjadi ketidaksetaraan antara pemerintah dan masyarakat, yang mengakibatkan pemerintah lebih fokus pada keuntungan individu tanpa mempertimbangkan kebutuhan umum masyarakat.

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini dibagi ke dalam empat bagian sebagai berikut:

1. Untuk menggali lebih jauh terkait pembangunan infrastruktur yang kurang memadai di Manggarai Barat dalam terang teori keadilan John Rawls demi mencapai suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di Manggarai Barat.
2. Untuk menanggapi sebuah persoalan ketidakadilan dalam pembangunan infrastruktur dalam terang teori keadilan John Rawls.
3. Untuk memberikan wawasan dan rekomendasi yang dapat membantu menciptakan kebijakan pembangunan yang lebih adil dan berkepentingan bagi masyarakat umum di daerah kabupaten Manggarai Barat.
4. Sebagai pemenuhan terhadap salah satu syarat dari seluruh persyaratan yang ditentukan oleh Institut Filsafat dan Teknologi kreatif Ledalero untuk memperoleh gelar sarjana filsafat.

### **1.4 Metode Penulisan**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskripsi kualitatif, yakni kepustakaan atau metode literer dengan mendeskripsikan teori keadilan John Rawls dalam menjawab persoalan ketidakadilan dalam pembangunan infrastruktur di Manggarai Barat. Dalam penelitian kualitatif pendapat yang dikemukakan berdasarkan hasil proses dari berbagai literatur yang berhubungan dengan tema pembangunan, keadilan, dan demokrasi seperti buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, surat kabar atau majalah, dan situs *online* dan kemudian penulis menyatukannya dalam suatu kerangka berpikir yang logis dan sistematis dalam proses pembahasan penulisan ini. Dan penggunaan literatur ini dikelompokkan ke dalam dua bagian, yakni sumber primer di mana sumber ini mendeskripsikan secara langsung dan mendalam tentang tema yang di angkat dan sumber sekunder yang secara tidak langsung mempunyai hubungan dengan tema pembahasan dalam tulisan ini.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Struktur sistematisasi penulisan skripsi ini dibagi ke dalam 5 bab.

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini, penulis menguraikan alasan dan latar belakang penulisan. Di dalamnya terdapat rumusan persoalan, tujuan, metode, dan sistematika penulisan.

Bab II: Realitas Pembangunan Infrastruktur di Manggarai Barat. Bab ini membahas realitas infrastruktur di Manggarai Barat, termasuk sejarah Manggarai Barat, topografi wilayah tersebut, serta masalah-masalah infrastruktur yang belum memadai, seperti jalan raya, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi dan kondisi gedung-gedung sekolah.

Bab III: Latar Belakang John Rawls dan Teori-Teori Keadilannya. Bab ini menjelaskan riwayat hidup John Rawls, karya-karyanya, dan Teori Keadilan John Rawls.

Bab IV: Pembangunan Infrastruktur di Manggarai Barat dalam Terang Teori Keadilan John Rawls. Bab ini merupakan inti dari penulisan, di mana penulis membahas pembangunan infrastruktur di Manggarai Barat dengan menggunakan teori keadilan John Rawls sebagai kerangka pemikiran. Bab ini terbagi menjadi beberapa bagian, termasuk pengantar, analisis teori keadilan John Rawls, dan penjelasan mengenai pembangunan infrastruktur di Manggarai Barat, penerapan teori keadilan Rawls pada Pembangunan Infrastruktur, tantangan dalam Penerapan Teori Keadilan Rawls, Dampak Pembangunan Infrastruktur yang Adil, dan kesimpulan. Bab V: Penutup. Pada bab terakhir ini, penulis menyajikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dalam penulisan ini. Selain itu, juga disertakan usul saran sebagai rangkuman akhir dari teks ini.

